

From a Mobilization Tool to a Pillar of the Revolution: The Transformation of the *Tonarigumi* into the *Rukun Tetangga* in the Early Years of Indonesian Independence (1945–1950)

Tandiono Bawor Purbaya^{a*}, Mukhammad Shokheh^{a*}

^aUniversitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

*Bawor06@students.unnes.ac.id, shokheh@mail.unnes.ac.id

Abstract

The Japanese occupation of Indonesia, which lasted 3.5 years, caused great suffering for the people. On the other hand, it also provided valuable lessons for the Indonesian people as they prepared to achieve independence. One such lesson came through the formation of various new institutions, including the *Tonarigumi*—or RT—at the grassroots level of society. This study explores the new roles and functions of the *Tonarigumi* during the period 1945–1950, with the aim of gaining an understanding of the process and significance of the *Tonarigumi*'s transformation into the RT during the era of independence for the nation's struggle and development. This study employs historical research methods, including heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The study found that during the 1945–1950 period, the *Tonarigumi* shifted its function to become an institution supporting the revolution at the grassroots level. Functions that had previously been dedicated to the interests of the Japanese war effort were transformed into means for mobilizing, consolidating, and distributing power to support the independence revolution. The actors driving this change were RT chairpersons and their members, as well as youth groups.

Keywords: *Tonarigumi*, Neighborhood Association, Indonesian Revolution, Social Mobilization.

Dari Alat Mobilisasi ke Pilar Revolusi: Transformasi *Tonarigumi* menjadi Rukun Tetangga pada Awal Kemerdekaan Indonesia (1945-1950)

Abstrak

Pendudukan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Di sisi lain juga memberikan pembelajaran bagi bangsa Indonesia guna menyiapkan dirinya mencapai kemerdekaan. Salah satunya melalui berbagai kelembagaan baru yang dibentuk. Antara lain keberadaan *Tonarigumi* atau RT di tingkat paling bawah masyarakat. Kajian ini mengeksplorasi peran dan fungsi baru *Tonarigumi* di periode 1945-1950, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang proses dan makna perubahan *Tonarigumi* menjadi RT dimasa kemerdekaan bagi perjuangan dan pembangunan bangsa. Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Kajian ini menemukan bahwa *Tonarigumi* di periode 1945-1950 beralih fungsi menjadi institusi untuk mendukung jalannya revolusi di tingkatan akar rumput. Fungsi fungsi yang tadinya diabdikan kepada kepentingan perang Jepang, berubah menjadi sarana untuk mobilisasi,

konsolidasi dan distribusi kekuatan untuk mendukung jalannya revolusi kemerdekaan. Sedangkan aktor aktor yang mendorong perubahan tersebut adalah para ketua RT dan anggoutanya serta golongan pemuda.

Kata Kunci: *Tonarigumi*, Rukun Tetangga, Revolusi Indonesia, Mobilisasi Sosial

Pendahuluan

Dalam sejarah Indonesia, pendudukan Jepang adalah satu babakan, yang menjadi jeda dari Hindia Belanda menjadi Indonesia. Fase transisi ini berawal pada 8 Maret 1942 ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Ter Poorten menyerah di Kalijati Subang, dan berakhir saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendudukan Jepang, selama 3,5 memberikan pengalaman berharga meskipun singkat. Pengalaman pahit berupa penderitaan, kelaparan, kemiskinan, siksaan, pembunuhan, perkosaan, kerja paksa sampai dengan perbudakan seksual dirasakan sebagian besar masyarakat. Namun demikian keberadaan pemerintahan Jepang juga memberikan pengaruh positif bagi bangsa Indonesia terutama untuk menyusun dan menyiapkan sendi-sendi kebangsaan dan kehidupan bernegara di masa-masa selanjutnya.

Di sisi politik pendudukan Jepang tidak memberi ruang bagi aktivitas politik yang berpotensi anti Jepang. Organisasi organisasi politik dibubarkan, hanya beberapa organisasi keagamaan yang di biarkan hidup seperti NU dan Muhammadiyah. Meski demikian, kedua organisasi keagamaan tersebut tidak luput dari pengawasan ketat oleh pemerintah. Bahkan tidak jarang dijumpai tindakan represif pemerintah kepada para ulama. Setidaknya tidaknya ada empat pola tindakan represif tersebut yaitu *pertama* penahanan tanpa pengadilan seperti yang terjadi pada KH Hasyim Ashari dan KH Mahfudz Shiddiq. *Kedua* pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara sampai dengan hukuman mati seperti yang dialami oleh KH Sunan Mundzir Kebarongan Banyumas dan ulama-ulama dari Wonosobo, dengan tuduhan pimpinan gerakan anti Jepang. (Zuhri, 1987, pp. 200-203). *ketiga* ditangkap karena melakukan perlawanan, di Adili, dan kemudian dihukum mati, seperti yang terjadi pada KH Zainal Mustapha dan pengikutnya (Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2010, p. 113), *keempat*, dihilangkan, karena dianggap sebagai penghasut seperti yang terjadi terhadap para ulama dan pimpinan masyarakat dari Kaplongan Indramayu (Kurosawa, 2015, p. 530) (Iryana, 2016: 285-300)

Kondisi represif tersebut menyebabkan para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia memilih dua cara perjuangan. Cara pertama adalah memilih bekerjasama, menjadi bagian dari sistem pemerintahan Jepang dan memasuki lembaga-lembaga yang dibentuk Jepang. Cara kedua adalah dengan melakukan gerakan bawah tanah. Kedua-duanya dengan segala kekurangan dan kelebihanannya melakukan upaya-upaya untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang dicita-citakan.

Pada periode ini Jepang melakukan beberapa hal yang menjadikan proses kearah kemerdekaan menjadi matang. *Pertama*, nasionalisme Indonesia didorong, sekalipun dorongan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk tujuan kemenangan perang Jepang. *Kedua*, menjanjikan pemerintahan sendiri di kemudian hari. Janji tersebut digunakan untuk membujuk tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan mengajak rakyat mendukung Jepang. Namun ruang untuk berkomunikasi dengan rakyat dimanfaatkan dengan baik oleh para tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo, Mohammad Yamin dan lain-lain untuk membangkitkan semangat kemerdekaan. *Ketiga*, Jepang menyusun berbagai barisan bersenjata di kalangan pemuda Indonesia, untuk membantu memenangkan perang Asia Timur Raya. Dalam perkembangannya barisan bersenjata dari kalangan pemuda aktif untuk menjadi bagian perjuangan melawan Jepang. *Keempat*, mendorong munculnya rasa senasib dan sepenanggungan di antara Bangsa Indonesia. Kekejaman dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh

Jepang secara langsung kepada rakyat, menyuburkan rasa kebencian terhadap penjajahan, dan menjadi ladang yang baik untuk membangun rasa kebangsaan (Oktorino, 2016, pp. 8-9).

Struktur politik ketatanegaraan Pendudukan Jepang khususnya di Jawa terdiri dari dua bagian. Di tingkat pusat, kepemimpinan dikuasai oleh Gunsireikan (Panglima Besar Tentara Jepang) yang kemudian berubah menjadi Saiko Sikikan. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Gunseikan, yang mempunyai beberapa bagian atau departemen dan Jawatan (Pringgodigdo, 1952, p. 25). Pulau Jawa sendiri dibagi dalam 17 *Syu*. Struktur yang setara dengan karesidenan di masa Hindia Belanda. Masing-masing *Syu* terdiri dari *Ken* (Kabupaten) dan *Si* (kota). Masing-masing *Ken* dan *Si* tersebut terdiri dari beberapa *Gun* (kawedanan). Unit pemerintahan di bawahnya adalah *Son* (kecamatan), *ku* (desa), *Aza* (dukuh) dan yang terbawah adalah *Tonarigumi* (Fajaruddin, 2022). Pemerintahan Jepang ini selain diisi oleh orang-orang Jepang di struktur tertinggi, namun juga diduduki oleh orang-orang dari bangsa Indonesia untuk jabatan-jabatan di bawahnya. Jabatan-jabatan tersebut banyak diambil oleh para tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai generasi, sebagai proses pembelajaran yang bermanfaat dalam proses menuju Indonesia merdeka.

Salah satu struktur baru dalam pemerintahan adalah keberadaan *Tonarigumi*. Organisasi ini berada di tingkat desa, terdiri dari 10-20 rumah tangga. Keberadaannya berfungsi untuk memperkuat usaha tolong-menolong bagi penduduk, melangsungkan usaha pemerintahan, bantu-membantu berdasarkan semangat gotong royong, memperkuat pembelaan tanah air, serta mencapai kemajuan dan keselamatan masyarakat (Asia Raya, 2604). Secara sederhana, keberadaan *Tonarigumi* digunakan untuk pertahanan di tingkat kampung, sumber perekrutan sukarelawan untuk membantu militer di bagian pertahanan (Zed, 2003, p. 253), melakukan propaganda, dan pengerahan massa untuk rapat, upacara, dan parade yang bersifat massal (Anderson, 1988, p. 49).

Namun demikian tujuan sebenarnya dari pembentukan lembaga ini adalah sebagai alat mobilisasi untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, melakukan kontrol dan pengawasan kepada lapisan terbawah dalam masyarakat, serta melakukan mobilisasi sumber daya masyarakat. (Kurosawa, 2015, p. 209). Pendapat ini berkesesuaian dengan kesaksian Sidik Kertapati, yang menyatakan bahwa keberadaan *Tonarigumi* dibentuk untuk menjadi pengalih perhatian dari permasalahan permasalahan politik, menghancurkan semangat, dan alat pengawasan preventif bagi rakyat. (Kertapati, 2000, p. 15). Sidik Kertapati sendiri adalah salah seorang yang terlibat dalam terjadinya proklamasi, dan menjadi bagian dari asrama Menteng 31 (Kusumabrata, 2023).

Pembentukan organisasi ini tidak lepas dari mulai melemahnya kekuatan pemerintahan pendudukan Jepang. Pasukan Jepang banyak mengalami kekalahan. Bahkan pada akhir maret 1944, daerah pertama Hindia Belanda telah dibebaskan oleh Pasukan Sekutu. Seiring dengan itu, maka janji kemerdekaan juga diberikan kepada bangsa Indonesia. Periode Maret 1944 sampai pertengahan Agustus 1945 sangatlah dinamis. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito menyatakan kekalahan Jepang. Di Indonesia sendiri dua golongan pejuang kemerdekaan, yaitu golongan "tua" seperti Soekarno, Hatta dan tokoh-tokoh serta golongan "muda", seperti pemuda-pemuda yang tergabung di Asrama Menteng 31, berusaha mewujudkan kemerdekaan dengan jalannya masing-masing. Tetapi cita-cita bersama untuk kemerdekaan akhirnya menjadikan tercapainya titik temu berupa Proklamasi 17 Agustus 1945 (Reybruck, 2025, pp. 302-305).

Keberadaan *Tonarigumi* tidak serta merta dihapuskan seiring dengan kekalahan Jepang dan tercapainya kemerdekaan. Organisasi ini tetap ada dan kemudian menjalankan peran dan fungsi baru dalam menuntaskan perjuangan revolusioner, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan

Untuk itulah kajian ini penting dalam rangka berusaha mengungkap peran dan fungsi baru *Tonarigumi* di periode 1945-1950, yang ditandai dengan transformasi *Tonarigumi* dari instrumen pemerintahan militer Jepang menjadi alat perjuangan bagi Republik Indonesia. Kajian ini juga mengungkap aktor sebagai agen perubahan di *Tonarigumi* dalam kurun waktu 1945-1950.

Keberadaan *Tonarigumi* menjadi kajian para peneliti sejarah khususnya sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia. Terdapat beberapa ahli yang mengkaji keberadaan *Tonarigumi* seperti Aiko Kurosawa, William H. Frederick, Robert Bridson Cribb, Harri J. Benda, dan H.A. Tiyanto. Di sisi lain terdapat juga beberapa kajian terkait tentang upaya upaya desentralisasi di awal kemerdekaan seperti yang disampaikan oleh Djohermansyah Djohan dan Maschuri Maschab.

Aiko Kurosawa menuliskan satu bab khusus dalam bukunya tentang keberadaan *Tonarigumi* dan Kumiai. Menurutnyanya keberadaan *Tonarigumi* berfungsi untuk membangun komunikasi langsung dan memperkuat kekuasaan pemerintah sampai ke tingkatan terbawah dari masyarakat. Bab tersebut menerangkan proses berdirinya, sejarah maksud, tujuan, fungsi dan aktivitas sehari-hari *Tonarigumi* (Kurosawa, 2015). Berbeda dengan Kumiai yang diterangkan nasibnya pasca pendudukan Jepang, Aiko Kurosawa tidak mengkaji lebih lanjut keberadaan *Tonarigumi* dan peran-peran yang dimilikinya setelah proklamasi kemerdekaan.

Dalam lingkup kota Surabaya William H. Frederick menyatakan bahwa *Tonarigumi* tidak mewakili situasi tempatnya dibentuk, namun lebih menunjukkan kepentingan pemerintah yang membentuknya. *Tonarigumi* menjadi pintu masuk pemerintahan kota ke dalam kampung-kampung di Surabaya. Secara umum masyarakat Kota Surabaya dengan enggan terlibat dalam *Tonarigumi*, atau setidaknya keberadaannya disesuaikan dengan tradisi lokal yang selama ini ada. Tekanan *Tonarigumi* terhadap masyarakat, malah memperkuat solidaritas, kerjasama, dan persatuan masyarakat secara internal. Meskipun secara umum masyarakat Kota Surabaya enggan dengan *Tonarigumi*, namun pasca kemerdekaan, *Tonarigumi* lah yang dijadikan jalur komunikasi para pemimpin perjuangan kemerdekaan (Frederick, 1989).

Dalam kajiannya Robert Bridson Cribb menyatakan bahwa keberadaan *Tonarigumi* berhasil membentuk jaringan yang menghubungkan antar daerah di Pulau Jawa. Selain itu, organisasi ini mempunyai akar yang kokoh ke tingkat lapisan paling bawah dari masyarakat dan memberikan pengalaman berorganisasi dan militer bagi anggota-anggotanya. Sehingga untuk wilayah Jakarta misalnya, terdapat grup-grup kecil yang kompak, saling terhubung dan mempunyai kemampuan militer (Cribb, 1990, pp. 33-34).

Dalam penelitiannya Harry J. Benda menyatakan bahwa *Tonarigumi* didirikan oleh Jepang untuk mengendalikan rakyat di pedesaan. Keberadaan *organisasi ini* juga menjadi kontestasi diantara para nasionalis yang tergabung di dalam Jawa Hokokai dan para pemuka gerakan Islam yang bergabung dalam Masyumi. Selanjutnya Benda menuliskan bagaimana upaya-upaya Masyumi dalam *Tonarigumi*, dan manfaat yang diperoleh Masyumi di periode 1950an dari usaha-usahanya tersebut. terlepas dari itu semua pada akhirnya *Tonarigumi* menjadi alat bagi bangsa Indonesia khususnya pemuda untuk belajar kepemimpinan dan

berorganisasi (Benda, 1985, p. 189). Meskipun mengungkapkan manfaat yang diperoleh Masyumi dalam keterlibatannya mengorganisir *Tonarigumi* di tahun 1950-an, Namun Benda tidak mengungkap bagaimana *Tonarigumi* berperan selama perang kemerdekaan.

Keberadaan dan peran *Tonarigumi* di Jawa selama periode Pendudukan Jepang di bahas dalam penelitian Hafis Arumingtyas Tiyanto. Penelitian ini membahas keberadaan *Tonarigumi*, peran dan pengaruhnya bagi pemerintah Jepang dan masyarakat di Jawa dalam periode 1942-1945. (Tiyanto, 2014). Kajian ini memberikan perspektif tentang dampak positif dan negative keberadaan *Tonarigumi* di Jawa. Namun karena rentang waktunya, maka tidak memberikan informasi keberadaan *Tonarigumi* di periode setelah kemerdekaan.

Paska kemerdekaan penataan kelembagaan dilakukan dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. Djohernyhan Djohan mengemukakan bahwa peraturan perundang undangan yang di ciptakan pada periode 1945-1950 terkait pemerintahan daerah berusaha memberikan ruang desentralisasi yang luas, khususnya di bidang politik. Namun demikian pelaksanaannya mengalami banyak hambatan dikarenakan perjuangan untuk merebut kemerdekaan (Djohan, 2005, pp. 61-78). Kajian ini memberikan informasi tentang desentralisasi dan kelembagaan di tingkat daerah, namun sama sekali tidak menyinggung keberadaan RT sebagai instrument politik di tingkat lokal.

Mashuri Maschab dalam kajiannya menyatakan bahwa di awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya upaya untuk mendemokratisasikan desa dari struktur yang diskriminatif antara lain melalui penghapusan desa perdikan dan perubahan tata cara pemilihan kepala desa. Proses demokratisasi desa tersebut menyebabkan terjadinya perubahan elit desa. Elit lama desa yang didasarkan keturunan dan feodalisme berubah ke elit baru desa yang salah satunya mengacu kepada kemampuan baca tulis. Begitu juga dengan keterlibatan perempuan .Pada awalnya perempuan tidak mempunyai hak pilih, namun kemudian ketentuan tersebut diubah dengan memberikan hak pilih termasuk kepada Perempuan.. Di samping itu proses perubahan kemudian menjadikan desa sebagai sebuah gelanggang politik (Maschab, 2013). Namun demikian penelitian Mashuri Maschab tidak menerangkan sama sekali keberadaan RT dan dampak perubahan tersebut terhadap RT sebagai sebuah lembaga yang ada di lapisan bawah desa

Tentang keberadaan RT di periode 1945-1950 dituliskan dalam kajian yang dilakukan oleh PJ Suwarno, dinyatakan bahwa di periode 1945 1950, posisi RT merdeka dari pengaruh administrasi pemerintahan di daerah dan bersifat mandiri. (Suwarno, 1995) Tetapi dalam kajian tersebut tidak di kaji lebih mendalam bagaimana kemandirian dan ketidak adanya pengaruh pemerintah daerah

Dari keseluruhan penelitian tersebut belum ditemukan kajian mendalam tentang perubahan *Tonarigumi* dari perangkat kekuasaan pemerintahan Pendudukan Jepang , menjadi Rukun Tetangga yang menjadi pendukung dan pilar perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sehingga dalam penelitian diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang proses dan makna perubahan *Tonarigumi* menjadi RT di periode 1945-1950, peran struktur organisasi di lapisan paling bawah masyarakat bagi perjuangan dan pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi pada sejarah sosial revolusi Indonesia dari perspektif pemerintahan tingkat kampung.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan sosial politik, yang meliputi *pertama* pengumpulan sumber atau heuristik. Data diperoleh dengan menggunakan metode kajian Pustaka. Bahan bahan yang digunakan adalah koran, buku buku yang terbit seaman, dokumen dokumen pemerintahan dan peraturan perundangan seaman, memoar dari tokoh maupun masyarakat di sekitar masa Pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan. Sumber lain terdapat dalam buku dan jurnal jurnal yang relevan dengan penelitian yaitu tema tema yang terkait dengan *Tonarigumi*, pendudukan Jepang di Indonesia, serta kelembagaan yang dibangun di masa tersebut serta fakta fakta di sekitar peristiwa proklamasi , perang kemerdekaan dan kejadian kejadian yang terkait di periode awal dalam proses mempertahankan kemerdekaan.

Kedua kritik sumber, dalam melakukan kritik sumber dilakukan dua tahapan. Secara eksternal yaitu otentitas dari sumber sumber yang di dapat, dan internal yaitu substansi dari sumber sumber tersebut. *ketiga* interpretasi dengan cara memberikan tafsir terhadap data yang diperoleh, menghubungkan satu data dengan yang lain, sehingga kemudian bisa menggambarkan dinamika peristiwa berdasarkan tema yang diteliti dan yang *keempat adalah* historiografi, yaitu melakukan penulisan sejarah secara kronologis tematis , yaitu memaparkan fakta fakta sejarah secara urutan waktu, namun disusun berdasarkan tema tema yang ditentukan. Harapannya penelitian ini terkomunikasikan dengan masyarakat dan dapat bermanfaat seperti tujuan yang digariskan.

Hasil dan Pembahasan

A. Tonarigumi: Warisan Koersif Pemerintah Pendudukan Jepang (1944-1945)

Tonarigumi diresmikan oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 11 Januari 1944 bersamaan dengan diselenggarakannya Konferensi Residen Seluruh Jawa. Selanjutnya dikeluarkanlah “Azaz Azaz Oentoek menjempoernakan Sosoenan Roekoen Tetangga” sebuah program terperinci untuk pengaturan *Tonarigumi*. Program terperinci tersebut meliputi maksoed dan susunan dari *Tonarigumi*. Keberadaan *Tonarigumi* di Indonesia adalah tiruan dari organisasi yang sama di Jepang. Keberadaan lembaga tersebut di tempt asalnya sempat dibubarkan, dan kemudian tumbuh kembali secara spontan sebagai organisasi kerjasama antar warga. Menjelang Perang Dunia ke Dua, organisasi ini direvitalisasi untuk kepentingan mobilisasi total. Organisasi yang sama juga terdapat di Taiwan. Pada awalnya lembaga ini adalah lembaga tradisional bernama ho ko. Setiap ko terdiri dari 10 hi yaitu 10 unit rumah tangga, Kemudian 10 ko disatukan dalam satu Ho. Setelah Jepang memulai pemerintahannya di Taiwan, maka sistem Ho Ko ini diberikan status resmi (Kurosawa, 2015) .

Seperti juga di Jepang dan Taiwan, Indonesia sendiri mengenal pengelompokan penduduk secara tradisional. Di Yogyakarta misalnya terdapat perkumpulan seperti Sinoman, Pralenan, dan sebagainya (Suwarno, 1995, p. 13), hal yang sama juga dapat kita temukan di Surabaya (Nuraida, 2018). Sementara di Bogor rakyat terorganisir melalui rukun tani dan rukun kampung (Zuhdi, 2017, p. 41). Semangat gotong royong yang terwujudkan dalam keberadaan organisasi organisasi kemasyarakatan tradisional inilah yang digunakan Jepang untuk melakukan propaganda untuk memperlancar dan memperluas pembentukan *Tonarigumi*.

Kelahiran *Tonarigumi* tidak bisa dilepaskan dari perencanaan pemerintahan pendudukan Jepang untuk melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia. keberadaan *Tonarigumi* terintegrasi dengan pelbagai organisasi bentukan Jepang yang sudah ada sebelumnya. khususnya Jawa Hokokai. Bahkan dalam sebuah kajian disebutkan sebagai organisasi induk *Tonarigumi* (Sihombing, 1962, p. 181).

Selain menggantikan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) organisasi yang bertugas memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang berperang (Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2010, p. 35), Jawa Hokokai juga melibatkan etnis etnis lain seperti Tionghoa, Arab, dan Eurasia (Benda, 1985, pp. 188-189). Perbedaan lain antara Putera dan Jawa Hokokai adalah masalah kepemimpinan dan jangkauannya. Putera dipimpin oleh bangsa Indonesia yaitu 4 serangkai (Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan KH Mas Mansyur) sementara Jawa Hokokai langsung dipimpin oleh Penguasa Militer Tertinggi Jepang, cabang cabang hokokai dijabat oleh pangreh praja di tingkatan cabang bersangkutan. Keberadaan Jawa Hokokai sendiri diadakan karena kondisi Jepang yang sudah mulai terdesak, selain keadaan ekonomi Jawa yang semakin merosot (Anderson, 1988, pp. 48-49).

Jawa Hokokai mempunyai program *pertama*, melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. *Kedua* memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan *ketiga* Memperkokoh pembelaan tanah air. *Tonarigumi* menjadi alat bagi Jawa Hokokai masuk sampai ke lapisan paling bawah dari desa (Ricklefs, 2022, p. 436). Keberadaan Jawa Hokokai di tingkat paling atas dan *Tonarigumi* di tingkat paling bawah, dimaksudkan sebagai alat kontrol dua arah. Jawa Hokokai akan menyampaikan kepentingan-kepentingan dari atas melalui propaganda dan perintah, di sisi lain *Tonarigumi* akan memasok pelbagai informasi ke atas (Aziz, 1955, pp. 223-224).

Tonarigumi juga menjadi wahana bagi organisasi-organisasi lain untuk beraktivitas salah satunya adalah Fujinkai. Sebagai salah satu Hokokai (himpunan kebaktian) di dalam Jawa Hokokai (Konggres Wanita Indonesia, 1978, pp. 60-61), para perempuan anggota *Fujinkai* bekerja bersama dengan ibu-ibu di tingkatan *Tonarigumi* untuk menyampaikan informasi dan melakukan usaha-usaha peningkatan hasil pertanian yang dibutuhkan untuk perang seperti kapas, padi, dan jarak (Dimas Aditia, Gerakan Feminisme Fujinkai dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Perempuan di Indonesia, 2022).

Lembaga lain yang terkait dengan keberadaan *Tonarigumi* adalah Masyumi. Organisasi ini merupakan transformasi dari federasi ormas Islam yang lahir pada tahun 1937. Oleh Jepang diubah menjadi MIAI dan dibubarkan setahun kemudian. Pembubaran tersebut disebabkan karena kekhawatiran Jepang terhadap keberadaan MIAI yang dianggap akan menyaingi *shumubu*. Keberadaannya kemudian diganti oleh Masjumi, yang diharapkan dapat merangkul umat Islam untuk kemenangan Jepang (Hanif A'la Ilhami, 2024).

Pada sebuah pertemuan tertutup pengurus Masyumi yang diadakan di Jakarta pada 28-30 Januari 1945, diputuskan program yang terinci untuk memperoleh posisi yang aman bagi Islam di *Tonarigumi*. dari hasil pertemuan ini kemudian dituangkan dalam program 14, yang menginstruksikan di bentuknya Barisan Pekerja Islam. Barisan pekerja ini diharapkan untuk memilih dan mendidik satu orang di dalam setiap *Tonarigumi*, untuk menyebarkan ajaran persaudaraan Islam dan juga menjadi tauladan bagi yang lain (Benda, 1985, pp. 216-218).

Keterlibatan tokoh Masjumi dalam proses pembentukan *Tonarigumi* bukanlah tiba tiba, pada Maret 1944 Zainul Arifin Pohan salah satu pengurus dewan Syuro Masyumi sudah menulis artikel dalam Suara Muslimin tentang “Rukun Tetangga Dalam Islam”, disamping domisilinya di Jatinegara yang menjadi model pelaksanaan *Tonarigumi*. Model tersebutlah yang ditinjau oleh peserta konfrensi residen residen, yang kemudian memutuskan keberadaan *Tonarigumi*. Berdasar program 14 tersebut kemudian Masjumi mengarahkan para pemuda pedesaan usia produktif untuk masuk ke dalam Barisan Pekerja Islam ataupun bergabung ke dalam laskar Hizbullah. Bergabungnya mereka ke Barisan Pekerja Islam atau Laskar Hizbullah menghindarkan mereka dari paksaan masuk Romusha (Helmi, 2015). Pemberitaan tentang hubungan Islam dengan *Tonarigumi* juga bisa dilihat dalam Suara Muslimin Indonesia 1 Juni 2604 /1944, yang menuliskan dalam pertemuan antara Tokubetsu Shichoo dengan 57 alim ulama dan guru agama di Jakarta Tokubetsu shi, TKRHM Adenan atas nama peserta menyatakan bahwa keberadaan *Tonarigumi* dan Jawa Hokokai sesuai dengan Islam (Soeara Moeslimin Indonesia, 2604)

Di samping efek negatif dari keberadaan *Tonarigumi* seperti rekrutmen romusha (Kasenda, 2015, p. 130), Jugun Ianfu (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010, p. xii), dan pengumpulan padi serta beras. *Tonarigumi* mempunyai efek positif yaitu menipiskan, kalaulah tidak bisa dibilang menghapus sekat antar kelompok sosial di dalam masyarakat (Chaniago, 1988) , Keberadaan *Tonarigumi* dalam unit unit kecil kemudian menjadi sumber rekrutmen terhadap pemuda dan masyarakat. Rekrutmen untuk kepentingan *Seinedan*, *Keibodan*, *Heiho*, Peta , Hizbullah, maupun *Romusha*. Di luar *Romusha* yang meskipun disebut sebagai prajurit pekerja, namun faktanya adalah kerja paksa. Kesemua rekrutmen tersebut memperoleh pendidikan militer, meskipun sifatnya terbatas (Sofuan, 2022) . Belum lagi berbagai pelatihan terhadap anggota *Tonarigumi* untuk pemadam kebakaran, atau menyiapkan tempat tempat perlindungan dari serangan udara dan pertahanan kampung.

B. *Tonarigumi* Sesudah Proklamasi

Pernyataan kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadikan bangsa Indonesia mempunyai sebuah negara. Namun demikian kelahiran negara baru ini tidak serta merta diikuti dengan keberadaaan pemerintahan baru yang berjalan efektif sampai ke lapisan terbawah masyarakat di desa desa. Kekalahan Jepang oleh sekutu, disusul oleh proklamasi, menjadikan sistem administrasi pemerintahan lama kehilangan keabsahannya. Pemerintahan pendudukan Jepang hanya mencoba mempertahankan status quo, sambil menunggu datangnya pemenang perang, dan mengambil alih kekuasaan. Sementara di pihak republik Indonesia berusaha mengambil alih kekuasaan. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka pada Oktober 1945 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah no 2 tahun 1945 yang menerangkan bahwa badan, lembaga, dan peraturan yang sudah ada sebelum 17 Agustus 1945 tetap berlaku , sepanjang belum diadakan yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD. Yang berarti juga termasuk keberadaan *Tonarigumi* sebagai salah satu institusi yang berada di tingkat desa. Pengaturan ini merupakan pelaksanaan dari pasal II aturan Peralihan UUD 1945.

Operasionalisasi peraturan pemerintah di atas dilakukan oleh daerah daerah, salah satunya di Surabaya. Dua hari setelah berlakunya Peraturan Pemerintah, tepatnya 12 Oktober 1945, Walikota Surabaya Radjamin Nasution mengumumkan perubahan penyebutan nama nama Jepang. *Tonarigumi* menjadi Rukun Tetangga dan

Aza menjadi Gabungan Rukun Tetangga. (Frederijk, 1989, p. 346) . Mengacu kepada peraturan pemerintah no 2 tahun 1945, maka fungsi fungsi *Tonarigumi* tidak berubah , hanya pengabdianya yang berubah yaitu untuk kelangsungan kemerdekaan republik Indonesia.

Baru Delapan belas bulan kemudian , secara nasional keberadaan RT diatur melalui Instruksi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Penerangan tertanggal 25 Juni 1947. Instruksi ini dilampiri dengan Pedoman Umum Rukun Kampung dan Rukun Tetangga yang di tandatangani Panitia Pusat Rukun Tetangga dan Rukun Kampung (Gabungan Rukun Tetangga) . Panitia ini terdiri dari Moh. Roem selaku Menteri Dalam Negeri, Moh Natsir selaku Menteri Penerangan dan Maria Ulfah Santosa sebagai Menteri sosial tanggal 25 Juni 1947, yang dikeluarkan oleh Kabinet Syahrir III (Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1950).

Kabinet Syahrir III akhirnya bubar dua hari setelah keluarnya instruksi tersebut, dan sebulan sesudahnya terjadi perang kemerdekaan I. Meskipun kabinet yang melahirkannya bubar, namun pedoman umum ini di masyarakat menjadi panduan dalam penyelenggaraan RT di masa revousi kemerdekaan. Bahkan kemudian RT tetap memegang peranan penting dalam proses mempertahankan kemerdekaan (Bagian Dokumentasi Kementrian Penerangan, 1954).

C. Bah Transformasi Fungsi Tonarigumi: Dari Alat Jepang ke Pilar Republik 91945-1950)

Secara resmi dari periode 1945 sampai 1947 *Tonarigumi* masih menggunakan aturan lama. Dan hanya mengalami perubahan sedikit salah satunya perubahan penyebutan menjadi Rukun Tetangga. Namun demikian *Tonarigumi* (kemudian disebut dengan RT) sudah bertransformasi dari alat untuk kemenangan Perang Asia Timur Raya menjadi pilar berdirinya republik. Semenjak diucapkannya proklamasi. *Tonarigumi* tetap menjalankan fungsinya namun dengan tujuan yang berbeda. Meminjam catatan Ibnu Parna, *Tonarigumi* beralih rupa dari “panitia mata mata jepang” menjadi “panitia distribusi kebutuhan rakyat”, hingga akhirnya menjadi “panitia revolusi” (Mustofa, 1986, p. 295).

Beberapa fungsi yang telah dijalankan *Tonarigumi* selama masa perang kemerdekaan adalah *pertama* mobilisasi, dalam hal ini *Tonarigumi* menjadi sumber rekrutmen sukarelawan, dan dukungan ke front pertempuran, *kedua* sebagai wadah konsolidasi, fungsi ini menempatkan *Tonarigumi* sebagai ruang bertemu dan dialog antar rakyat maupun rakyat dan negara. *ketiga* fungsi ekonomi dan logistik revolusi, fungsi ini menjadikan *Tonarigumi* menjadi sebagai saluran distribusi logistik untuk mendukung perjuangan.

Fungsi pertama *Tonarigumi* nampak dalam keputusan rapat tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Rapat menetapkan keberadaan Badan keamanan Rakyat. Badan ini merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang, yang sudah dibentuk sebelumnya. Di tingkatan *Tonarigumi* disebutkan bahwa unsur pimpinan BKR dilakukan oleh 5 (lima) orang pemuda yang mempunyai kemampuan (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 1991) . ketetapan PPKI ini disambut oleh pemuda. Di Jakarta para pemuda bekas Peta berkumpul dan kemudian menyusun struktur BKR sesuai dengan pembagian wilayah zaman pendudukan Jepang yaitu BKR tingkat *Syu, Ken, SI, Gun, Son, ku* sampai ke tingkat *Tonarigumi* (Suryomihardjo, 1991). Dari beberapa sumber lain diketemukan bahwa jumlah BKR di masing masing *Tonarigumi* terdiri diantara 3 (Dkk, 1997) sampai 30 orang (Majid & Darmiati, 1999). Badan Keamanan

Rakyat (BKR) inilah yang kemudian bertransformasi sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Rakyat Indonesia (TRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti yang kita kenal saat ini.

Dalam melakukan mobilisasi dan rekrutmen peran *kumicho* sangat penting, seperti yang dilakukan oleh Mang Nasroh, *kumicho* di daerah Matraman yang saat ini secara administrative berada di Jakarta Pusat. Rumah Mang Nasroh dijadikan sebagai pos Barisan Pelopor dan kemudin bersama sama merebut senjata dari Jepang (Idris, 1996, p. 41) . Tidak jauh dari Matraman, yaitu di Salemba, *Kumicho* Soenarto Tjitrodarsono juga memimpin warganya untuk merebut senjata dari pos penjagaan Jepang. Persenjataan dan personel pemegangnya, pasca Jakarta semakin tidak aman, akhirnya keluar dari Jakarta dan bergabung dengan berbagai kesatuan ketentaraan (Idris, 1996, p. 153).

Selanjutnya adalah fungsi kedua *Tonarigumi* sebagai wadah konsolidasi masyarakat. Kondisi dan situasi yang diciptakan Jepang selama masa pendudukan, menjadikan masyarakat siap untuk melakukan konsolidasi dan memahami ide menjadi aksi (Cribb R. , 1985). Hal ini tercatat dalam Kesaksian Alizar Thalib salah seorang pemuda dari asrama menteng 31 pada peristiwa rapat raksasa di Ikada 19 September 1945. Menjelang maghrib, setelah rapat raksasa para pemuda kembali ke Menteng 31. Alizar Thalib dibantu oleh Pitojo kemudian mengadakan rapat bersama perwakilan perwakilan pemuda yang berasal dari siku (kecamatan). Rapat ini menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan mobilisasi umum. Kesepakatan tersebut di kordinasikan dengan istilah “Komando Siap” secara beranting dari rukun tetangga , kelurahan dan kecamatan. Salah satu bentuknya adalah kesiap siagaan para pemuda untuk menjaga wilayahnya masing masing dengan apa yang tersedia di sekitarnya, salah satu bentuknya adalah blokade dan penjagaan mulut mulut gang oleh para pemuda bersenjata bambu runcing (Thalib, 1993, p. 93).

Di Surabaya, paska proklamasi Sumarsono dan kelompoknya melakukan konsolidasi melalui ketua ketua *Tonarigumi*. Bahkan kemudian masyarakat kampung mengonsolidasikan dirinya, menjaga keamanan kampung, dan membangun kekuatan bersenjata,serta memilih pemimpin pemimpinnya sendiri (Frederijk, 1989, p. 268 &304).

Dalam peristiwa Bandung lautan api RT berperan dalam menyebarluaskan informasi dan mengkonsolidasikan warga untuk menjalankan kebijakan republik untuk mengosongkan Bandung dan melakukan bumi hangus (Sitaresmi, 2013, pp. 142-143). Sementara di Semarang, Rukun Tetangga (RT), menjadi penanda tentang masih adanya Republik Indonesia di Kawasan perkotaan (Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah; Republik Indonesia, 1953, p. 121). Modal inilah yang kemudian terbukti tangguh ketika harus menghadapi agresi militer (Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah; Republik Indonesia, 1953, p. 30) .

Fungsi ketiga adalah fungsi ekonomi dan logistik revolusi, di masa Pendudukan Jepang *Tonarigumi* mempunyai fungsi untuk melakukan distribusi kebutuhan masyarakat. Ternyata fungsi tersebut sangat berguna ketika masa perang kemerdekaan, bahkan ketika pemerintahan di atasnya tidak berfungsi. Dalam pertempuran lima hari di Semarang, sempat terjadi kekosongan pemerintahan, ketika para pemimpin Republik di tahan oleh Jepang, SK Tri Murti bersama Sumakti, Marsuci dan kawan kawan mengatur upaya distribusi beras. Dari rumahnya dia mengajak wakil wakil rukun tetangga untuk diberi surat keterangan yang

ditandatangani dan tanpa stempel guna minta jatah beras. beras tersebut harus dibeli kontan ke gudang gudang beras, untuk didistribusikan di daerah masing masing. SK Trimurti kemudian dikenal sebagai jurnalis dan aktivis organisasi Perempuan, pernah menjadi Menteri Perburuan Kabinet Amir Syarifudin (1947) dan Anggota Dewan Nasional (1959) (Soebagijo, 1982, pp. 114-115). Di Banyumas, keberadaan *Tonarigumi* berlanjut dan berubah nama dan digunakan untuk kepentingan kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai basis pertahanan. Hal yang sama terjadi juga di Yogyakarta, berdasarkan kesaksian IN Suprapti, Rukun Tetangga menjadi basis kekuatan untuk kepentingan logistik dan pertolongan bagi para pemuda pejuang dan rakyat ketika menghadapi Jepang (Suprapti, 1959, p. 224).

D. Aktor perubahan *Tonarigumi*

Proses perubahan *Tonarigumi*, dari alat kekuasaan Jepang menjadi pilar revolusi tidak terlepas dari intervensi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Ketika Jepang masih berkuasa, ada dua pola intervensi yang dilakukan, *pertama* intervensi dari luar, yaitu melalui program dan lembaga lembaga lain milik pemerintahan Pendudukan Jepang yang berhubungan dengan *Tonarigumi*. Intervensi kedua adalah melalui keterlibatan langsung dalam *Tonarigumi*. Tercatat BM Diah sebagai pemimpin gerakan pemuda Angkatan Baru menjadi ketua *Tonarigumi* di lingkungannya (Diah, 2018, p. xxi), begitu juga dengan Mastoer, seorang tokoh pendidikan di Blora, dan kebetulan juga ayah dari Pramodya Ananta Toer (Toer, 2022, p. 123). tokoh lain yang tercatat menjadi ketua *Tonarigumi* adalah Zainal Simbangan, yang menjadi *Kumicho* di Salemba Bluntas (Chaniago, 1988, p. 21). Dalam perjalanannya kemudian Zainal Simbangan pernah menjadi salah satu pimpinan pusat Serikat Kaum Tani Indonesia (Sakti) (Bandung Bergerak, 2023).

Dua model intervensi tersebut kemudian menjadikan *Tonarigumi* siap menjadi alat revolusi, ketika waktunya tiba. Di periode 1945-1949, proses perubahan berlanjut dengan dikeluarkannya kebijakan yang tetap mempertahankan *Tonarigumi* sebagai sebuah organisasi, dengan perubahan perubahan yang menyesuaikan dengan semangat kemerdekaan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan proses tetap dilakukan dari dua sisi. Dari dalam dilakukan oleh para ketua *Tonarigumi* atau *kumicho* bersama anggota anggotanya, untuk menjalankan fungsi fungsi revolusioner dari *Tonarigumi*. seperti yang dilakukan *Kumicho* Nasroh dan *Kumicho* Soenarto, ketua-ketua RT di Bandung dalam peristiwa Bandung Lautan Api, ketua RT di Semarang dalam Pertempuran Lima Hari di Semarang, maupun selama perang kemerdekaan, Ketua ketua RT di Surabaya sepanjang masa sebelum pertempuran 10 November, juga di Banyumas. Intervensi kedua dilakukan dari luar oleh aktor golongan pemuda seperti Barisan Pelopor, para pejuang perempuan dalam pertempuran lima hari di Semarang, Dan Soemarsono di Surabaya.

Simpulan

In de tijd van de nationale revolutie heeft, echter de Rukun Tetangga belang- Tijk bijdragen in de nationale inspanning voor het verkrijgen van de Kemerdekaan.

Namun pada masa revolusi nasional, Rukun Tetangga memberikan kontribusi penting dalam upaya nasional mencapai Kemerdekaan.

De locomotif 01 november 1951

Bahwa keberadaan *Tonarigumi* sebagai susunan organisasi terendah di tingkat masyarakat pada awalnya adalah organisasi yang sengaja dibentuk penjajah Jepang untuk mengeksploitasi tenaga dan sumber daya rakyat Indonesia. Namun demikian kemudian melalui berbagai organisasi lain yang juga dibentuk Jepang maupun terlibat langsung di dalamnya, para pimpinan pergerakan kemerdekaan Indonesia mampu memberikan isian semangat kemerdekaan. Paska kemerdekaan, sesuai dengan aturan peralihan dalam UUD 1945, maka keberadaan *Tonarigumi* dipertahankan. Meskipun secara kelembagaan bentuk *Tonarigumi* tetap, namun seiring dengan perubahan nama menjadi RT, maka *Tonarigumi* menjalankan fungsi fungsi mobilisasi, konsolidasi, dan distribusi sumber daya untuk kepentingan mempertahankan kemerdekaan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut *Tonarigumi* bahu membahu dengan kelompok lain, khususnya dengan golongan pemuda.

Aktor aktor yang teridentifikasi mempengaruhi perubahan dibagi dalam dua babakan. Di masa pendudukan Jepang aktor aktornya adalah para pejuang kemerdekaan baik yang memilih berada di lembaga lembaga bentukan Jepang yang berelasi dengan *Tonarigumi*, maupun mereka yang memilih untuk menjadi bagian dari *Tonarigumi*. Sementara itu dalam periode 1945-1949, negara baik di pusat maupun di daerah melalui kebijakannya menjadi aktor keberlangsungan dan perubahan *Tonarigumi* menjadi alat revolusi. Sedangkan secara operasional perubahan di kawal oleh para Ketua RT, anggota RT, dan golongan pemuda.

Proses yang terjadi di *Tonarigumi*, menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak sekedar dicapai dengan perjuangan bersenjata oleh tentara dan laskar, maupun diplomasi yang dilakukan oleh elite politik di republik baru ini. Namun kemerdekaan juga diperoleh melalui persiapan jangka panjang dan pembangunan struktur maupun infrastruktur berbasis dan melibatkan masyarakat di semua lapisan.

Keadaan ini mempunyai implikasi dalam penulisan sejarah Indonesia. Revolusi kemerdekaan Indonesia, tidak bisa semata mata dilihat sebagai sebuah peristiwa politik dan militer di tingkatan nasional, yang dilakukan oleh segelintir orang yang mempunyai keistimewaan. Namun juga sebagai sebuah proses pendidikan, pengorganisasian, administrasi yang berkelanjutan dan mobilisasi masyarakat di tingkatan terbawah. Kondisi ini menjelaskan bagaimana kemudian RT tetap relevan sampai saat ini.

Selanjutnya perlu penelitian lebih lanjut guna mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang keberadaan dan peran *Tonarigumi* dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, perbandingan dengan organisasi organisasi sejenis khususnya di luar Jawa maupun, evolusi struktur di periode periode selanjutnya. Di sisi lain penelitian lanjutan ini diperlukan guna melihat pola pola pengorganisasian yang sifatnya massif di tingkat komunitas dengan melibatkan hubungan timbal balik antara pihak pihak luar dan masyarakat dalam unit unit kecil.

Daftar Pustaka

- Aditia,D ,et. All. (2022). Gerakan Feminisme Fujinkai Dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Perempuan di Indonesia. *Fajar Historia Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 6(1) , 87-97, <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i1.5145>
- Anderson, B. R. O'G. (1988). *Revolusi pemoeda: Pendudukan Jepang dan perlawanan di Jawa 1944–1946*. Pustaka Sinar Harapan.
- Aziz, M. A. (1955). *Japan colonialism and Indonesia*. Martinus Nijhoff.
- Asia Raya. (2604/1944, 12 Januari). *Asia Raya*, Tahun III(2).
- Bagian Dokumentasi Kementerian Penerangan.(1954). *Susunan Kabinet Kabinet RI dan Riwayat Hidup Ringkas Para Menteri 1945-1947*.Bagian Dokumentasi Kementerian Penerangan
- Benda, H. J. (1985). *Bulan sabit dan matahari terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*. Pustaka Jaya.
- Bandung Bergerak. (2023). *Samsir Mohamad, pejuang dari lereng Burangrang*.
- Cribb, R. (1985). Jakarta: Kerjasama dan perlawanan di dalam sebuah kota yang diduduki. Dalam A. R. Kahin (Ed.), *Pergolakan daerah pada awal kemerdekaan*. Grafiti Pustaka Utama.
- Cribb, R. B. (1990). *Gejolak revolusi di Jakarta 1945–1949: Pergulatan antara otonomi dan hegemoni*. Pustaka Utama Grafiti.
- Diah.H. (2018). Sekapur sirih. Dalam B. M. Diah, *Peran “pivotal” pemuda seputar lahirnya Proklamasi 17 Agustus 1945*. Yayasan Obor.
- Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah. (1953). *Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah*. Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah.
- Djohan, D. (2005). Otonomi Daerah Masa Kemerdekaan hingga demokrasi terpimpin (1945–1965). Dalam S. Wignosubroto et al. (Ed.), *Pasang surut otonomi daerah*. Institute for Local Development.
- De Locomotief*. (1951, November 1).
- Frederick, W. H. (1989). *Pandangan dan gejolak masyarakat kota dan lahirnya revolusi Indonesia (Surabaya 1926–1946)*. Gramedia.
- Helmi, A. (2015). *KH Zainul Arifin Pohan: Panglima santri, ikhlas membangun negeri*. Pustaka Kompas.
- Idris, I., et al. (1996). *Aku ingat rasa dan tindak siswa sekolah kolonial di awal merdeka bangsa*. Sinar Harapan.
- Ilhami, H. A., et al. (2024). Politik hukum Islam di Indonesia pada masa kolonial Jepang: Politisasi dan militerisasi. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*,20(2).39-55 <https://doi.org/10.24042/tps.v20i2.23294>
- Iryana, W. (2016). Protes sosial petani Indramayu masa pendudukan Jepang (1942–1945). *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 8(3), 285–300.
- Kasenda, P. (2015). *Soekarno di bawah bendera Jepang 1942–1945*. Kompas.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia (1950). *Pedoman Umum Rukun Kampung dan Rukun Tetangga*. Kementerian Penerangan Republik Indonesia. d

- Kertapati, S. (2000). *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Pustaka Pena.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2010). *Menggugat negara Indonesia atas pengabaian hak-hak asasi manusia (jugun ianfu 1942–1945)*. Komnas HAM.
- Kongres Wanita Indonesia. (1978). *Sejarah setengah abad pergerakan wanita Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kurosawa, A. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942–1945*. Komunitas Bambu.
- Kompas. (2023, Januari 28). *Mengapa dibentuk Putera dan apa tujuannya?*
- Kusumabrata, A., & Pribadi, I. T. (Ed.). (2023, 3 Nov). *Sidik Kertapati, eksponen pejuang revolusi yang terasingkan*. Tirto. <https://tirto.id/sidik-kertapati-eksponen-pejuang-revolusi-yang-terasingkan-gREm>
- Lapian, A. B., & Chaniago, J. R. (1988). *Di bawah pendudukan Jepang: Kenangan empat puluh dua orang yang mengalaminya*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Majid, D., & Darmiati. (1999). *Jakarta–Karawang–Bekasi dalam gejolak revolusi*. Keluarga Moeffreni Moe'min.
- Maschab, M. (2013). *Politik pemerintahan desa di Indonesia*. PolGov.
- Moehkardi. (2021). *Revolusi nasional 1945 di Semarang*. Gadjah Mada University Press.
- Mustofa, S. (1986). *Sukarni dalam kenang-kenangan teman-temannya*. Sinar Harapan.
- Nuraida, A. (2018). *Pendudukan Jepang di Indonesia: Terbentuknya Tonarigumi 1942–1945* (Skripsi, Universitas Indonesia).
- Oktorino, N. (n.d.). *Di bawah matahari terbit: Sejarah pendudukan Jepang di Indonesia 1941–1945*. Elex Media Komputindo.
- Pramudawardani, I., & Fajaruddin, R. (2022). *Pendudukan Jepang dan pengaruhnya terhadap perkembangan politik di Indonesia tahun 1942–1945*. Penerbit Lakeisha.
- Pringgodigdo, A. G. (1952). *Tatanegara di Djawa pada waktu pendudukan Djepang dari bulan Maret sampai bulan Desember 1942*. Jajasan Fonds Universitit Negeri Gadjah Mada.
- Rahardjoe, P. (Ed.). (1991). *Badan Keamanan Rakyat (BKR): Cikal bakal Tentara Nasional Indonesia*. Peta.
- Reybrouck, D. van. (2025). *Revolusi Indonesia dan lahirnya dunia modern*. Kompas Gramedia.
- Ricklefs, M. C. (2022). *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Serambi.
- Sihombing, O. D. P. (1962). *Pemuda Indonesia menantang fasisme Djepang*. Sinar Djaya.
- Sitairesmi, R., et al. (2013). *Saya pilih mengungsi: Pengorbanan rakyat Bandung untuk kedaulatan*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
- Soebagijo, I. N. (1982). *SK Trimurti: Wanita pengabdian bangsa*. Gunung Agung.
- Sofuan, T. K. (2022). Rivalitas KNIL dan PETA dalam sejarah kemiliteran Indonesia pada masa awal kemerdekaan. *Keraton: Journal of History Education and Culture*. 4 (2), 79-86 . DOI: <https://doi.org/10.32585/keraton.v4i2.3496>
- Suprpti, I. N. (1959). Kenangan dalam detik-detik Proklamasi. Dalam *Buku peringatan 30 tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Departemen Penerangan.
- Suwarno, P. J. (1995). *Dari Azazyookai dan Tonarigumi ke Rukun Kampung dan Rukun Tetangga di Yogyakarta (1942–1989)*. Universitas Sanata Dharma.
- Soeara Moeslimin Indonesia. (1944, Juni 1).

- Thalib, A. (1993). *19 September dan Angkatan Pemuda Indonesia*. Yayasan Padepokan Pancuran Mas.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. (2010). *Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik*. Balai Pustaka.
- Tiyanto, H.A. (2014). *Peran Tonarigumi (Rukun Tetangga) di Jawa Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret)
- Toer, K. S. (2002). *Mas Toer bapak kami*. Pataba Press.
- Warmansjah, G. A., et al. (1997). *Sejarah revolusi fisik daerah DKI Jakarta*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zed, M. (2003). *Kepialangan politik dan revolusi Palembang 1900–1950*. LP3ES.
- Zuhdi, S. (2017). *Bogor zaman Jepang 1942–1945*. Komunitas Bambu.
- Zuhri, S. (1987). *Berangkat dari pesantren*. Gunung Agung.